

Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa

Marthinus Mandagi

Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

marthinusmandagi@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Governance
Village Government
Administration

This study aims to describe and analyze the implementation of Village Government as well as describe and analyze the determinants of the implementation of Village Government in Suluan Village, Tombulu District, Minahasa Regency. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results of the analysis of the research findings show that in administering government, the Village Government in Suluan Village, Tombulu District, in this case the management of the Village Rule Book, the Village Head Decision Book, and the Village Inventory and Wealth Book, based on the results of research conducted by researchers, found that there are still obstacles in administering government of the three books, namely: 1) Awareness of the duties and responsibilities of village officials, in this case the professionalism of village officials, which is still minimal; 2) lack of oversight from the district and sub-district governments and even the BPD in supervising and monitoring governance related to the three books. Furthermore, in the governance of the Suluan Village Government, Tombulu District, Minahasa Regency, in this case the three books found several determinant factors influencing the administration of village government, namely: 1) Communication; 2) Resources; 3) Disposition; 4) Bureaucratic Structure.

INTISARI

Kata kunci:

Tata Kelola
Administrasi
Pemerintah Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemerintahan Desa serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penentu pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu dalam hal ini pengelolaan Buku Peraturan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, dan Buku Inventarisasi dan Kekayaan Desa berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan dari ketiga buku tersebut yaitu : 1) Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab perangkat desa dalam hal ini profesionalisme perangkat desa yang masih minim; 2) kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan bahkan BPD dalam pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan ketiga buku tersebut. Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dalam hal ini ketiga buku tersebut ditemukan adanya beberapa faktor determinan yang

Diterima : 12-06-2023

Dipublish : 30-06-2023

mempengaruhi administrasi pemerintahan desa yaitu : 1) Komunikasi ; 2) Sumber Daya ; 3) Disposisi ; 4) Struktur Birokrasi.

Copyright © 2023 (Marthinus Mandagi). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa sangat penting bagi berjalannya pemerintahan desa. Pengelolaan desa berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh sistem pengelolaan atau administrasi yang benar, rapih yang akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, mengontrol kegiatan, evaluasi, serta komunikasi dan informasi yang baik. Dalam mengelola pemerintahan desa dengan baik, kepala desa harus secara komprehensif mengelola dan memahami mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa [1].

Mengacu pada Permendagri No 47 Tahun 2016 Admisistrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa dan pada buku Register Desa. Berdasarkan Permendagri No 47 Tahun 2016 ruang lingkup administrasi pemerintahan meliputi a). Administrasi Umum, b). Administrasi keuangan, c) Administrasi Penduduk, d). Administrasi Pembangunan dan, e). Administrasi Lainnya. Dalam administrasi umum terdapat 1). buku peraturan desa, 2). buku keputusan kepala desa, 3). buku inventaris desa dan kekayaan desa, 4). buku aparat pemerintah desa, 5). buku tanah kas desa, 6). buku tanah di desa, 7). buku agenda, 8). buku ekspidisi, 9). buku lembaran desa dan buku berita desa. Dalam administrasi penduduk terdapat 1). buku induk penduduk, 2). buku mutasi penduduk desa, 3). buku rekapitulasi jumlah penduduk, 4). buku penduduk sementara, 5). buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga. Dalam administrasi keuangan terdapat 1). buku APB Desa, 2). buku rencana anggaran biaya, 3). buku kas pembantu kegiatan, 4). buku kas umum, 5). buku kas pembantu, 6). buku bank desa. Dalam administrasi pembangunan terdapat 1). buku rencana kerja pembangunan desa, 2). buku kegiatan pembangunan, 3). buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan, 4). buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat [2].

Demi terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik, hingga para pengelola aadministrasi pemerintahan desa wajib betul- betul memahami serta mengenali apa saja yang jadi tugas, pokok, serta guna mereka dimana dalam pengelolaan mereka wajib benar mengenali mekanisme tata kelola administrasi pemerintahan

kelola administrasi pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik serta bebas dari kesalahan- kesalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa.

Tentunya sangatlah penting peranan pemerintah kabupaten bahkan kecamatan dalam hal ini pada pelaksanaan sosialisasi, penyampaian pedoman petunjuk-petunjuk dalam pengelola administrasi pemerintahan serta pengawasan-pengawasan dan monitoring, serta memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa khususnya pada pengelolaan buku peraturan didesa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa. Serta peranan BPD dalam mengawasi serta memonitoring jalannya pengelolaan administrasi pemerintahan desa [3].

Sementara itu dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa khususnya pada buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa masih sangat membutuhkan peranan pemerintah kabupaten maupun kecamatan dengan tujuan untuk membina, mengawasi, bahkan konsultasi.

Adapun masalah didapati dalam pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan dalam hal ini pada pengelolaan buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan masih terdapat kendala-kendala dalam penerapan tata kelola pada ketiga buku tersebut yaitu 1) masih kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab dari aparatur desa dalam hal ini pada segi profesionalitas dari aparatur Desa Suluan yang masih minim. Dari hasil penelitian terlihat bahwa masih ada perangkat desa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang tugas dan tanggung jawabnya serta. Selanjutnya kendala dalam penerapan pada pengelolaan dari buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa yaitu 2) kurangnya pengawasan dari tingkat pemerintah Kabupaten serta Kecamatan bahkan BPD dalam mengawasi serta memonitoring terkait tata kelola pada buku Peraturan di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Inventaris dan Kekayaan Desa.

* Korespondensi Penulis; marthinusmandagi@unima.ac.id desa. Dengan demikian pnyelenggaraan tata

3). Kurangnya koordinasi antar aparatur desa yang

ada yaitu antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam pengelolaan dari ketiga buku tersebut. Pada hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pengawasan di tingkat kecamatan baru bisa diketahui melalui lomba desa dimana ditemukan bahwa untuk buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa masih terjadi kekosongan, berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk pengawasan dalam pengelolaan pada buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa belum dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.

Selanjutnya dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan dalam hal ini pada buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa berdasarkan hasil penelitian belum berjalan dengan baik dan efektif dikarenakan terdapat factor-faktor determinan yang mempengaruhi penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam hal ini pada pengelolaan buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa. Dimana berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan ada beberapa factor yang bersifat determinan yang sukses berhasilnya tata kelola administrasi pemerintahan desa yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi Sikap dan 5) Struktur Birokrasi. Dimana factor komunikasi dalam penelitian ini yaitu dimana komunikasi dalam hal ini lewat sosialisasi tujuan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tombulu serta pedoman-pedoman dalam melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa sampai dengan pengawasan dan monitoring telah dilaksanakan. Namun kebijakan tersebut belum terlalau dicermati atau dipahami dengan baik oleh para pelaksana dalam hal ini para perangkat desa yang ada.

Selanjutnya untuk factor sumber daya yaitu sumber daya staf dalam hal ini para perangkat desa yang ada belum terlalu memahami tugas dan fungsi sebagai perangkat desa. Dalam hal ini sekertaris desa belum sepenuhnya memahami bagaimana pengelolaan administrasi pemerintahan desa, serta kaur umum juga belum memahami sepenuhnya apa yang menjadi tugas. Serta dikarenakan dengan sumber daya dalam hal ini sarana dan prasarana yaitu gedung kantor desa baru saja mulai beroperasi jadi sebelum gedung kantor desa beroperasi, segala pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa belum berjalan sepenuhnya atau belum efektif, dikarenakan kantor desa dahulu masih di kediamannya kepala desa [4].

Selanjutnya untuk factor disposisi sikap berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana bahwa terkait seluruh elemen pemerintah desa yang ada dalam pelaksana tata kelola administrasi pemerintahan desa telah menerima dan

mendukung jalannya kebijakan ini dalam hal ini kebijakan administrasi pemerintahan desa. Hanya saja dalam melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa ini perangkat yang ada belum mempunyai komitmen, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajiban. Serta kurangnya ketegasan dari pimpinan dalam hal ini kepala desa.

Selanjutnya untuk factor struktur birokrasi berdasarkan hasil penelitian dimana dalam struktur birokrasi dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa di desa Suluan belum mempunyai Standar Oprasional Prosedur (SOP). Sehingga dapat dilihat dimana dalam pengelolaan administrasi pemerintahan bulum sepenuhnya berjalan efektif.

Adapun masalah-masalah yang peneliti temui dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa di desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Tata Kelola Adminitrasi Pemerintahan Desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa"

2. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif. Karena dengan penelitian kualitatif, lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul [5].

Dalam penelitian ini mengenai Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dalam hal ini peneliti hanya focus pada Administrasi Umum, dalam hal ini juga pada Buku Peraturan di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku inventaris dan Kekayaan Desa. Selanjutnya untuk dapat mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian berjumlah 6 enam orang, yaitu : Kepala Desa Suluan, Sekretaris Desa Suluan, Kaur Umum Desa Suluan, Ketua BPD Suluan, KASI Pemerintahan Kecamatan Tombulu serta KASI Penataan Administrasi dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/ Kelurahan.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu 1) Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. 2) Wawancara adalah teknik pengumpulan data utama dalam metode kualitatif. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber [6].

3) Dokumentasi Metode pengumpulan data terakhir yang umum digunakan dalam penelitian sosial adalah pemeriksaan dokumen.

Selanjutnya untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, dengan prosedur, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Dimana untuk Reduksi data : data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituang dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Penyajian data : atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu penelitian. Dan untuk Menarik kesimpulan : dalam penarikan kesimpulan peneliti melakukan verifikasi data secara terus menerus selama penelitian berlangsung [7].

3. Hasil dan Pembahasan

Sistem pengelolaan berjalan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan desa dilakukan dengan baik. Hal ini terutama tercermin dari komitmen seluruh kepala desa. Keberhasilan tersebut diawali dengan penyusunan perencanaan desa yang baik dan didukung oleh informasi yang akurat untuk menyediakan sistem pengelolaan yang lengkap dan akurat.

Ketertiban system administrasi dimulai dari tersedianya buku administrasi desa yang meliputi buku Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Pembangunan dll. Mengacu pada PERMENDAGRI N0 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam peraturan ini tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi : Administrasi umum merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat administrasi umum. 1)Administrasi Umum sebagaimana dimuat meliputi : a) Buku Peraturan Desa, b)Buku keputusan Kepala Desa, c)Buku Inventaris dan Kekayaan Desa, d)Buku Aparat Pemerintah Desa, e)Buku Tanah Kas Desa, f)Buku Tanah di Desa, g)Buku Agenda, g)Buku Ekspedisi; dan Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa [2].

Untuk menghasilkan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik, maka perlu diperhatikan dalam pengelolaannya. Maka peneliti mengkaitkan dengan teori Achmad Daniri tentang prinsip dasar good governance terdiri dari lima prinsip yang terkandung dalam good governance atau pemerintahan yang baik. Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan atau kewajaran [8].

Jon Pierre mengatakan bahwa Tata Kelola merujuk pada koordinasi yang terus menerus dan koheren antar berbagai pelaku dengan tujuan dan sasaran yang berbeda. Pelaku tersebut dapat berubah actor politik, institusi, kelompok,

masyarakat sipil, non pemerintah, dan organisasi tradisional [9].

Selanjutnya menurut Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana mengatakan bahwa tata kelola adalah seperangkat aturan yang berlaku untuk pengelolaan dan pengendalian suatu organisasi. Kepemimpinan organisasi terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, aturan etika, transparansi dan akuntabilitas [10].

Maka dari itu untuk melihat lebih jauh terkait masalah yang ada dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa di desa suluan dalam hal ini pada administrasi umum, dalam hal ini juga pada buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa. Berikut hasil temuan dilapangan yang peneliti temukan berdasarkan dari ketiga indicator tersebut:

3.1. Buku Peraturan di Desa

Untuk terciptanya administrasi pemerintahan desa yang baik dan berjalan efektif maka para pelaksana penyelenggaraan tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam hal ini para aparatur desa harus memperhatikan bagaimana cara pelaksanaan tata kelola yang baik. Beranjak dari itu maka peneliti merujuk pada teori dari Achmad Daniri yaitu teori prinsip dasar tata kelola yang baik. Dimana berdasarkan temuan dilapangan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku peraturan desa di desa suluan peneliti mengkaitkan dengan salah satu prinsip tata kelola yang baik dari Achmad Daniri, yaitu akuntabilitas. Dimana Akuntabilitas merupakan adanya kewajiban dari aparatur desa untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akuntabilitas yaitu suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan suatu keberhasilan dan kegagalan atas kinerja yang dilakukan. Akuntabilitas dapat diimplementasikan melalui pendekatan strategis yang menyesuaikan dengan cepatnya perubahan organisasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi secepat mungkin dengan mengantisipasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. [8].

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang terjadi dilapangan dimana dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam hal ini pada buku peraturan di desa suluan masih terjadi kekosongan dikarenakan belum dikelola dengan baik oleh para pelaksana yaitu aparut desa. Dimana dalam pertanggung jawaban dari aparatur desa terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku peraturan desa di desa suluan belum sepenuhnya dilakukan karena dalam hal ini kurangnya pengawasan serta monitoring secara rutin untuk memeriksa secara langsung di lapangan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan. Serta kurangnya perhatian dari BPD untuk memperhatikan

pengelolaan buku peraturan desa. Dalam hal kurangnya pengawasan serta monitoring dari pemerintah kabupaten dan kecamatan maka peneliti mengkaitkan dengan salah satu prinsip tata kelola yang baik yaitu responsibilitas. Dimana responsibilitas adalah suatu pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan agar supaya dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa setempat dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta hasil pengamatan peneliti yang peneliti temui dilapangan bahwa para aparatur desa masih lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka, dan mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku peraturan desa serta kurangnya perhatian dari kepala desa dalam memperhatikan kinerja dari perangkat desa. Dimana untuk buku peraturan desa di desa suluan saat ini belum diisi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016. Sesuai temuan untuk peraturan desa memang sudah ada salah satunya yaitu peraturan desa mengenai pendapatan dan belanja desa, dan mengenai untuk dalam menerbitkan suatu peraturan desa lainnya masih terdapat kendala sehingga desa suluan masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan lebih intens dari instansi terkait baik dari pemerintah Kabupaten maupun tingkat Kecamatan. Sehingga dapat dilihat bahwa untuk profesionalitas dari aparatur desa suluan dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa masih bisa dikatakan sangat minim [2].

Untuk itu dalam segi profesionalitas peneliti mengkaitkan dengan salah satu dari prinsip tata kelola yang baik teori dari Achmad Daniri yaitu prinsip independensi dimana profesionalitas individu dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku peraturan desa sangatlah berpengaruh dalam penerapan jabatan atau rekrutmen pada organisasi apapun pada jenis, sakala dan ukurannya. Profesionalitas kerja diukur dari individu yang mampu memilah kepentingan pribadi dengan kepentingan umum dalam proses tata kelola administrasi yang baik [8].

3.2. Buku Keputusan Kepala Desa

Selanjutnya pada indicator kedua ini terkait penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku keputusan kepala desa di desa suluan sesuai temuan yang peneliti temukan dilapangan bahwa dalam pengelolaan buku keputusan kepala desa di desa suluan belum berjalan dengan baik dan efektif. Dimana pada buku Keputusan Kepala Desa masih terjadi kekosongan, dikarenakan dalam pengelolaanya

belum dikelola dengan baik oleh para pelaksana yaitu aparut desa. Dimana dalam pertanggung jawaban dari aparatur desa terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku keputusan kepala desa di desa suluan belum sepenuhnya dilakukan karena dalam hal ini kurangnya pengawasan serta monitoring secara rutin untuk memeriksa secara langsung di lapangan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan. Serta kurangnya perhatian dari BPD untuk memperhatikan pengelolaan buku keputusan kepala desa.

Beranjak dari itu maka peneliti merujuk pada teori dari Achmad Daniri yaitu teori prinsip dasar tata kelola yang baik [11]. Dimana berdasarkan temuan dilapangan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku keputusan kepala desa di desa suluan peneliti mengkaitkan dengan salah satu prinsip tata kelola yang baik dari Achmad Daniri [11], yaitu akuntabilitas. Dimana berdasarkan temuan yang peneliti temui bahwa kurangnya akuntabilitas dari aparatur desa suluan terhadap penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku keputusan kepala desa. Selanjutnya dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku keputusan kepala desa juga terdapat kendala dari profesionalitas aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku keputusan kepala desa yaitu aparatur masih kurang menyadari tugas dan tanggung jawab mereka sehingga untuk buku keputusan kepala desa di desa suluan saat ini belum diisi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam PERMENDAGRI No 17 Tahun 2016. Sesuai temuan yang ada bahwa untuk keputusan kepala desa sudah ada keputusan kepala desa yang telah dikeluarkan dan menjadi peraturan desa, salah satunya pada social kemasyarakatan yaitu seperti kompania duka begitu pun di bidang-bidang lain contoh seperti sanksi kepada masyarakat hewan di kebun orang lain. Sehingga dapat dilihat bahwa untuk profesionalitas dari aparatur desa suluan dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa masih bisa dikatakan sangat minim [12].

Untuk itu dalam segi profesionalitas peneliti mengkaitkan dengan salah satu dari prinsip tata kelola yang baik teori dari Mamonto yaitu prinsip independensi dimana profesionalitas individu dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku keputusan kepala desa sangatlah berpengaruh dalam penerapan jabatan atau rekrutmen pada organisasi apapun pada jenis, sakala dan ukurannya. Profesionalitas kerja diukur dari individu yang mampu memilah kepentingan pribadi dengan kepentingan umum dalam proses tata kelola administrasi yang baik [13].

Selanjutnya dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku keputusan kepala

desa, pemerintah desa masih sangat membutuhkan bimbingan ataupun pelatihan-pelatihan dari pemerintah Kabupaten maupun tingkat Kecamatan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa dalam hal ini pada buku keputusan kepala desa [14]

3.3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa

Pada indicator ketiga ini yaitu buku inventaris dan kekayaan desa dimana dalam tata kelolanya belum berjalan dengan baik dalam hal ini pada buku inventaris dan kekayaan desa masih terjadi kekosongan sehingga pengelolaanya bisa dikatakan belum efektif. Sama halnya dengan buku peraturan di desa dan buku keputusan kepala desa, dimana buku inventaris dan kekayaan desa dikarenakan berdasarkan temuan yang ada dimana dalam pelaksanaan tata kelola nya dikarenakan yang pertama kurangnya profesionalitas oleh aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola buku inventaris dan kekayaan desa, serta minimnya pengetahuan oleh perangkat desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola buku inventaris dan kekayaan desa dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kaur umum desa suluan belum terlaku cakap dalam mengelola buku inventaris dan kekayaan desa. Maka dari itu peneliti pun mengkaitkan dengan salah satu dari prinsip tata kelola yang baik teori dari Achmad Daniri dalam Goinpeace yaitu prinsip independensi dimana profesionalitas individu dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku inventaris dan kekayaan desa sangatlah berpengaruh dalam penerapan jabatan atau rekrutmen pada organisasi apapun pada jenis, sakala dan ukurannya. Profesionalitas kerja diukur dari individu yang mampu memilah kepentingan pribadi dengan kepentingan umum dalam proses tata kelola administrasi yang baik [15].

Selanjutnya kendala dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku inventaris dan kekayaan desa berdasarkan pengamatan dari peneliti menunjukkan bahwa kurangnya sikap ketegasan dari kepala desa dalam melihat kinerja dari aparat yang ada, serta kurangnya pengawasan dari BPD dalam pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa, dan juga kurangnya pengawasan serta monitoring secara rutin untuk memeriksa secara langsung di lapangan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan. Dalam hal kurangnya pengawasan serta monitoring dari pemerintah kabupaten dan kecamatan maka peneliti mengkaitkan dengan salah satu prinsip tata kelola yang baik teori dari Achmad Daniri yaitu *responsibilitas*. Dimana *responsibilitas* adalah suatu pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan agar supaya dapat dengan

mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa setempat dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan [8].

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan administrasi desa dalam buku inventaris dan kekayaan desa ini aparat desa masih juga sangat memerlukan bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk mungkin itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku inventaris dan kekayaan desa dari pemerintah yang ada baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

Kesimpulan akhir dari focus ini melihat dari hasil temuan diatas dari ketiga indicator tersebut mengenai tata kelolanya maka peneliti mengkaitkan dengan *grand theory* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep tata kelola. Dimana konsep tata kelola menurut Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana mengatakan bahwa tata kelola adalah seperangkat aturan untuk mengatur dan mengendalikan suatu organisasi. Kepemimpinan organisasi terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, aturan etika, transparansi dan akuntabilitas. Dimana menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dalam hal ini pada Buku Peraturan di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, serta Buku Inventaris dan Kekayaan Desa dimana terlihat bahwa dalam pengelolaannya belum berjalan dengan baik serta efektif dikarenakan, ada beberapa kendala-kendala yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam hal ini pada tata kelola dari ketiga buku tersebut yaitu masih kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab dari aparat desa dalam hal ini pada segi profesionalitas dari aparat desa Suluan yang masih mini [10].

Selanjutnya terkait kurangnya pengawasan serta monitoring dari pemerintah tingkat Kecamatan dan Kabupaten bahkan BPD di Desa Suluan dalam mengawasi serta memonitoring terkait tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam hal ini pada pengelolaan Buku Peraturan di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa serta Buku Inventaris dan Kekayaan Desa.

Temuan selanjutnya yaitu kurangnya koordinasi antar aparat desa yang ada yaitu antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam pengelolaan dari ketiga buku tersebut. Maka peneliti juga megkaitkan dengan *theory* Menurut Jon Pierre mengatakan bahwa *Tata Kelola* merujuk pada koordinasi yang terus menerus dan koheren antar berbagai pelaku dengan tujuan dan sasaran yang berbeda. Pelaku tersebut dapat berubah actor politik, institusi, kelompok, masyarakat sipil, non pemerintah, dan organisasi tradisional [9].

Dari temuan-temuan yang didapati diatas maka

dapat disimpulkan bahwa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik sehingga untuk Buku Peraturan di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa serta Buku Inventaris dan Kekayaan Desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa saat ini masih terjadi kekosongan dimana untuk ketiga buku tersebut ada tetapi tidak diisi. Juga dikarenakan mengapa belum diisi karena untuk para pengelolanya gaji/ upah yang mereka terima tidak sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan. Dimana untuk gaji para perangkat desa yang mengelola untuk administrasi pemerintahan desa bersumber dari dana ADD yang di tetapkan oleh Kabupaten lewat SK Bupati. Tetapi pada kenyataannya pada perangkat hanya dibayar dengan sangat minim.

Dimana berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan ada beberapa factor yang bersifat determinan yang mempengaruhi tata kelola administrasi pemerintahan desa. seperti yang Langkai membahas konsep Erward III yaitu terdapat empat indikator dalam implementasi kebijakan publik, yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu proses implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi dan Sikap, dan 5) Struktur Birokrasi [16].

3.4. Komunikasi

Sesuai dengan indicator yang pertama yaitu komunikasi dapat dilihat bahwa mengenai kebijakan tentang administrasi pemerintahan desa dimana komunikasi dalam hal ini lewat sosialisasi tujuan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tombulu serta pedoman-pedoman dalam melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa sampai dengan pengawasan dan monitoring telah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara rutin dikarenakan keadaan sekarang yang saat ini masih dalam kondisi pandemi. Namun kebijakan tersebut belum terlalau dicermati atau dipahami dengan baik oleh para pelaksana dalam hal ini para perangkat desa yang ada.

Begitu juga komunikasi dengan BPD Desa yang ada dimana dalam pengawasan dan monitoring BPD dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif dikarenakan dengan situasi dan kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemic Covid.

3.5 Sumber Daya

Dalam indicator kedua sumber daya juga sangat mempengaruhi kebijakan, dalam hal ini kebijakan mengenai administrasi pemerintahan desa. Dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa di desa suluan kecamatan tombulu kabupaten minahasa saat ini peneliti melihat bahwa sumber

daya staf dalam hal ini para perangkat desa yang ada belum terlalu memahami tugas dan fungsi sebagai perangkat desa. dalam hal ini sekertaris desa belum sepenuhnya memahami bagaimana pengelolaan administrasi pemerintahan desa, serta kaur umum juga belum memahami sepenuhnya apa yang menjadi tugas.

Serta dikarenakan dengan sumber daya dalam hal ini sarana dan prasarana yaitu gedung kantor desa baru saja mulai beroperasi jadi sebelum gedung kantor desa beroperasi, segala pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa belum berjalan sepenuhnya atau belum efektif. Dikarenakan kantor desa dahulu masih di kediamannya kepala desa.

3.6 Disposisi Sikap

Sesuai dengan penelitian yang peneliti temu maka peneliti menyimpulkan bahwa indicator disposisi disini adalah dimana bahwa terkait seluruh elemen pemerintah desa yang ada dalam pelaksana tata kelola administrasi pemerintahan desa telah menerima dan mendukung jalannya kebijakan ini dalam hal ini kebijakan administrasi pemerintahan desa. Hanya saja dalam melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa ini perangkat yang ada belum mempunyai komitmen, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajiban. Serta kurangnya ketegasan dari pimpinan dalam hal ini kepala desa.

3.7. Struktur Birokrasi

Sesuai dengan indicator struktur birokrasi yang peneliti temukan dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa di desa suluan belum mempunyai Standar Oprasional Prosedur (SOP). Sehingga dapat dilihat dimana dalam pengelolaan administrasi pemerintahan bulum sepenuhnya berjalan efektif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa sesuai dengan indicator atau sub focus yang penulis gunakan yaitu :

- 1) Pada pengelolaan buku peraturan desa di Desa Suluan belum berjalan dengan baik sehingga untuk buku peraturan desa masih terjadi kekosongan dimana untuk buku tersebut ada tapi belum di isi. Serta kurangnya koordinasi dari pimpinan yang ada dalam hal ini kepala desa dalam memperhatikan kinerja dari perangkat desa. Juga dalam menerbitkan suatu peraturan desa, dimana desa masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan lebih intens dari instansi terkait baik dari pemerintah Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.

- 2) Pada pengelolaan buku keputusan kepala desa di Desa Suluan belum berjalan dengan baik sehingga untuk buku keputusan kepala desa masih terjadi kekosongan dimana untuk buku tersebut ada tapi belum diisi. Selanjutnya terdapat kendala kurangnya pengawasan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten serta BPD Desa Suluan. Serta kurangnya koordinasi dari pimpinan yang ada dalam hal ini kepala desa dalam memperhatikan kinerja dari perangkat desa. Serta terdapat kendala dalam menerbitkan suatu surat keputusan kepala desa itu ada konsederan tata dinas yang menjadi landasan hukum yang masih perlu di desa itu mendapat bimbingan atau mungkin pelatihan-pelatihan dalam mengeluarkan bunyi peraturan sesuai dengan dasar hukum yang ada.
- 3) Pada pengelolaan buku inventaris dan kekayaan desa di Desa Suluan belum berjalan dengan baik sehingga untuk buku inventaris dan kekayaan desa ini masih terjadi kekosongan dimana untuk buku tersebut ada tapi belum diisi. Selanjutnya terdapat kendala kurangnya pengawasan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten serta BPD Desa Suluan. Serta kurangnya koordinasi dari pimpinan yang ada dalam hal ini kepala desa dalam memperhatikan kinerja dari perangkat desa. Serta dalam pelaksanaan administrasi desa dalam buku inventaris dan kekayaan desa ini aparatur desa masih sangat memerlukan bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk atau bentuk pelatihan-pelatihan terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa pada buku inventaris dan kekayaan desa dari pemerintah yang ada baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.
- 4) Komunikasi kebijakan mengenai administrasi pemerintah desa ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan melalui sosialisasi-sosialisasi serta penyampaian-penyampaian pedoman pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Namun kebijakan tersebut belum terlalu dicermati atau dipahami dengan baik oleh para pelaksana dalam hal ini para perangkat desa yang ada. Begitu juga komunikasi dengan BPD Desa yang ada dimana dalam pengawasan dan monitoring BPD dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif dikarenakan dengan situasi dan kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemic Covid.
- 5) Sumberdaya dalam penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan dimana perangkat desa yang ada khususnya dalam mengelola buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa dan buku inventaris dan kekayaan desa belum terlalu mempunyai kecakapan serta keterampilan serta dalam sumber daya sarana dan prasarana dalam hal ini kantor desa suluan baru saja mulai beroperasi. Sehingga kegiatan pengadministrasian belum berjalan sepenuhnya.
- 6) Disposisi dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan seluruh elemen pemerintah desa yang ada dalam pelaksana tata kelola administrasi pemerintahan desa telah menerima dan mendukung jalannya kebijakan ini dalam hal ini kebijakan administrasi pemerintahan desa. Hanya saja dalam melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa ini perangkat yang ada belum mempunyai komitmen, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajiban. Serta kurangnya ketegasan dari pimpinan dalam hal ini kepala desa
- 7) Sturuktur Birokrasi dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa di Desa Suluan belum mempunyai Standar Oprasional Prosedur (SOP). Sehingga dapat dilihat dimana dalam pengelolaan administrasi pemerintahan bulum sepenuhnya berjalan efektif. Oleh sebab itu dapat kita lihat bahwa Standar Oprasional Prosedur (SOP) sangat berpengaruh terhadap jalannya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Referensi

- [1] K. Barat, "PENATAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TEWASEN KECAMATAN AMURANG BARAT," *J. Eksek.*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [2] "Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa." 2016.
- [3] G. Tumbel, R. Sendouw, and J. Mokat, "Political Accountability through the Legitimacy of the Regional House of Representatives in Regional Regulations Making," 2019. doi: 10.2991/icss-19.2019.117.
- [4] J. E. Langkai, H. Akib, and C. I. Musah, "The Impact of the Implementation Based on the Policy Development Neighborhood for the Social Welfare in the City Of Manado," *Mediterr. J. Soc. Sci.*, 2016, doi: 10.5901/mjss.2016.v7n2s1p259.
- [5] Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," *Bandung Alf.*, 2016.
- [6] U. Sekaran, *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [8] A. Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Indones. Kadin Indones.*, 2016.
- [9] R. Nugroho, *Public Policy: Dinamika*

- Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. 2017. doi: 10.1017/S0033291702006190.
- [10] N. Rachman, E. Asap, and W. Emir, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- [11] M. D. Achmad, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia, 2005.
- [12] “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.”
- [13] F. H. Mamonto, J. E. Langkai, and R. C. Mowilos, “Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa,” *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm.)*, 2020, doi: 10.36412/jan.v1i2.1639.
- [14] S. B. Kairupan and J. Mantiri, “Openness of Public Information in the Management of Village Funds in North Minahasa Regency,” 2020. doi: 10.2991/assehr.k.201014.001.
- [15] G. H. Tumbel and A. S. Langkay, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Sekolah,” *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm.)*, vol. 1, no. 1, 2019, doi: 10.36412/jan.v1i1.998.
- [16] G. C. Edward III, “Public Policy Implementing,” *Literary and Linguistic Computing*. 1984. doi: 10.1093/lc/15.2.157.



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).